KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-09.KP.03.03 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
DARI DAN DALAM JABATAN ADMINISTRASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk kepentingan dinas dalam rangka percepatan peningkatan kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu melakukan pengangkatan dan pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan administrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan administrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 1964, tentang Penetapan Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007, tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-85.KP.04.01 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa Untuk Atas Nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menandatangani Keputusan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, diberhentikan dari jabatan lamanya sebagaimana tersebut dalam lajur 4, diangkat dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 5, dan diberikan tunjangan jabatan struktural sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA: . . .

KEDUA : Biaya perjalanan ke tempat tugas yang baru ditanggung oleh Negara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal pelantikan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 April 2015

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

Dr. BAMBANG RANTAM SARIWANTO
NIP. 196012151988021001

Tembusan:
1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
5. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM;
6. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM;
7. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM;
8. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM;
9. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM;
10. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM;
11. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM;
12. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM;
13. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM;
14. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Hukum dan HAM;
15. Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum dan HAM;
16. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang bersangkutan;
17. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : M.HH-09.KP.03.03 TAHUN 2015
TANGGAL : 02 April 2015

NO	NAMA / NIP	PANGKAT (GOL/RUANG)	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	HUSIN NAFARIN, S.H. NIP. 19600613199203100 1	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Bagian Umum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan	Kepala Bidang Pelayanan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan	Eselon III.a Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp.1.260.000,00
2	RAKHMAT RENALDY, A.Md.IP., S.H., M.H. NIP. 197310101996031001	Pembina (IV/a)	Kepala Bagian Informasi dan Komunikasi pada Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Sekretariat Jenderal	Kepala Bagian Umum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan	sda.
3	Dr. PAGAR BUTAR BUTAR, S.H., M.Si. NIP. 19720824199403100 1	Pembina (IV/a)	Kepala Bagian Evaluasi dan Laporan pada Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal	Kepala Bagian Informasi dan Komunikasi pada Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Sekretariat Jenderal	sda.
4	DODOT ADIKOESWANTO, Bc.IP., S.H., M.H. NIP. 197110211994031001	Pembina (IV/a)	Kepala Bagian Umum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat	Kepala Bagian Evaluasi dan Laporan pada Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal	sda.
5	ASEP SUDERAJAT, S.H. NIP. 197404111999031002	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Subbagian Analisa Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Luar Negeri pada Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal	Kepala Subbagian Penggandaan II pada Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal	Eselon IV.a Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp.540.000,00
6	DONI HANDRIANSYAH, S.H. NIP. 198012121999031001	Penata (III/c)	Kepala Subbagian Penyusunan Formasi dan Pengadaan Pegawai pada Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal	Kepala Subbagian Analisa Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Luar Negeri pada Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal	sda.
7	ACHMAD FAHRURAZI, S.H., M.H. NIP. 197812122001121001	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Subbagian Mutasi III pada Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal	Kepala Subbagian Penyusunan Formasi dan Pengadaan Pegawai pada Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal	sda.
8	WAHJU PRIHANDONO, S.H., M.H. NIP. 19721008199903100 1	Penata (III/c)	Kepala Subbagian Mutasi I pada Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal	Kepala Subbagian Mutasi III pada Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal	sda.
9	ZULFAHMI, S.E., M.H. NIP. 197406171999031001	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Subbagian Mutasi II pada Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal	Kepala Subbagian Mutasi I pada Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal	sda.

10. . . .

1	2	3	4	5	6
10	EEM NURMANAH, S.Sos., M.Si. NIP. 196906071992032001	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Subbagian Analisa Kebutuhan Pengembangan Pegawai pada Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal	Kepala Subbagian Mutasi II pada Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal	Eselon IV.a Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp.540.000,00
11	HESTU PURWESTRI KUSUMANINGTYAS, S.H. NIP. 198102282005012001	Penata (III/c)	Fungsional Umum pada Sekretariat Jenderal	Kepala Subbagian Analisa Kebutuhan Pengembangan Pegawai pada Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal	sda.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

Dr. BAMBANG RANTAM SARIWANTO
NIP. 196012151988021001